

## PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN PERSONALIA LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

Entoh Tohani  
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY  
tohani@uny.ac.id

### Abstrak

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) sebagai institusi pendidikan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan warga masyarakat yang produktif dan mandiri. Oleh karenanya, personalia lembaga pendidikan ini harus memiliki kemampuan berwirausaha agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel seiring dengan tantangan yang dihadapi. Aktivitas pengembangan kapasitas ini dapat dilakukan pada level satuan pendidikan, lokal, maupun nasional. Semua ini akan berjalan apabila terbangun komitmen bersama dan kesadaran dalam rangka mewujudkan warga masyarakat yang berkualitas.

Kata kunci: kapasitas, kewirausahaan, pendidikan, masyarakat, personalia

### PENDAHULUAN

Pendidikan pada sadarnya dilakukan untuk menghasilkan individu-individu yang dapat berkembang menjadi individu yang kreatif, produktif, dan lebih berkarakter (Noeng Muhadjir, 2000). Melalui pendidikan pula kesejahteraan hidup warga masyarakat diharapkan dapat tercapai baik dalam bidang ekonomi, social budaya dan politik dapat tercapai. Dalam bidang ekonomi, pendidikan berfungsi untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang produktif dan mandiri, berperilaku inovatif, dan memiliki sikap dan nilai berwirausaha. Dalam bidang social budaya, melalui

pendidikan setiap warga negara diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian utuh, berkarakter baik dan memiliki perilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam kehidupan politik, melalui pendidikan, warga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam menyukseskan pembangunan bangsa, dan selalu melaksanakan dan menjaga perilaku demokratis, toleransi, dan kebersamaan dengan orang lain (Fegerlind & Saha, 1983).

Keberhasilan pembangunan pendidikan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi

tanggung jawab bersama tiga pilar pelaksana pembangunan pendidikan yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam kaitan ini, masyarakat memiliki kewajiban dan hak untuk merencanakan, melaksanakan, dan membina serta mengembangkan berbagai upaya edukatif sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Walau disadari bahwa sering pembangunan pendidikan kurang mendapatkan partisipasi masyarakat yang tinggi disebabkan sikap dan perilaku warga masyarakat yang tidak kooperatif dan apatis, kurang tersedia ruang untuk menyampaikan pesan atau pikiran terhadap kebijakan/kepentingan yang ada, dominasi kelompok tertentu, dan sistem sosial yang membatasi setiap warga masyarakat untuk berkembang. Oleh karena itu, partisipasi sebagai hasil dan masukan pembangunan pendidikan, perlu dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu baik pada level lembaga, lokal maupun nasional (Taliziduhu Ndraha, 1990:101). Salah satunya melalui peran dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),

kelompok paguyuban, kelompok Pos Daya, dasa wisma, perkumpulan perempuan, dll..

### **Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat sendiri disamakan dengan konsep "*community education for development*" (Meriam & Cunningham, 1989:440). Mereka mengartikan konsep tersebut sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat datang untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi di antara mereka, menggunakan sumberdaya yang diperlukan, dan melakukan suatu rencana tindakan atau belajar atau keduanya. Umberto Sihombing (Fasli Jalal & Dedi S., 1999:189) menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya adalah pendidikan yang berada di masyarakat, untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat, dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat, dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat. Berdasarkan kedua pendapat ini, pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu proses pendidikan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mampu mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi,

potensi sumber daya yang dimiliki, merumuskan pemecahan-pemecahan masalah, serta bertindak mengatasi masalah dengan menggunakan potensi yang ada berdasarkan pada prinsip partisipasi demokratis guna meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikapnya.

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat biasanya berhubungan dengan isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, konsumerisme, masalah-masalah lingkungan, pendidikan dasar, masalah budaya dan sejarah etnis, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan pendidikan kewarganegaraan dan politik. Sementara lembaga yang memberikan pendidikan kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisasi kesehatan, perpustakaan, museum, lembaga keagamaan, organisasi pemuda, organisasi pelayanan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Jadi munculnya pendidikan berbasis masyarakat didorong oleh beragam kebutuhan akan keterampilan dan pengetahuan baru mengenai masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Pemikiran mengenai perlunya pendidikan berbasis masyarakat dikembangkan adalah keinginan terwujud

kemandirian masyarakat. Masyarakat mandiri berarti masyarakat yang mampu mengarahkan perilakunya secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu tanpa ketergantungan dari pihak lain. Kemandirian masyarakat menjadi syarat penting guna terwujudnya masyarakat yang terdidik (*educated society*). Hal ini disebabkan adanya kesulitan-kesulitan dan tantangan yang ada dihadapi manusia sehingga memaksa manusia berusaha untuk mencari alternative-alternatif pemecahan masalah yang inovatif dengan menggunakan kreativitasnya. Dalam proses pengembangan pendidikan, masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah sehingga memaksa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat adalah: keterbatasan sekolah reguler/konvensional, afirmasi keragaman budaya, penguatan masyarakat madani, keterbatasan anggaran belanja pemerintah, dan adanya desentralisasi pemerintahan (Dean Nelsen, dalam Fasli dan Dedi, 2000:179).

### **Tantangan pendidikan berbasis masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat harus berorientasi tiga hal yang menjadi tantangan yaitu bagaimana mencapai tingkat kinerja manajemen, aksesibilitas, dan akuntabilitas

yang baik. Aspek manajemen, menekankan bahwa pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat harus mampu dikelola secara: 1) efektif, pengelolaan program harus mampu dilaksanakan secara tepat sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik; 2) efisien, berarti pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat tanpa terjadi penyimpangan atau pemborosan dalam menggunakan sumberdaya yang ada; dan 3) relevan, program pendidikan berbasis masyarakat harus selalu mampu menyesuaikan dengan perkembangan lapangan dan ipteks, dan menghasilkan manfaat penting.

Aspek aksesibilitas menekankan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memberikan peluang besar kepada setiap warga masyarakat baik yang berada di pedesaan dan perkotaan. Mereka memiliki kesempatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan menikmati hasil program tanpa batasan wilayah, etnis maupun hal lainnya. Akses yang mudah memungkinkan setiap warga masyarakat dapat mendapatkan layanan pendidikan sebagai hak setiap warga negara baik anak usia dini, remaja, dan orang dewasa; baik beruntung maupun belum beruntung (marginal). Sedangkan aspek akuntabilitas

memiliki pengertian bahwa dalam setiap penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dilakukan dengan prinsip kerjasama dan partisipasi masyarakat. Hal ini berarti program pendidikan berbasis masyarakat selalu melibatkan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan dilandasi keterbukaan atau transparansi yang saling menguntungkan.

### **Kapasitas kewirausahaan**

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan baik *output* maupun *outcome* harus dapat dicapai oleh PKBM. Pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan harapan awal pengelolaan PKBM yaitu tercapainya efektivitas PKBM dalam memajukan masyarakat baik pada level individu, organisasi maupun masyarakat baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi (Cheng, YH., 1996:31; Stoll, Louis & Tiley, Katheryn., 1999). Walaupun dalam kenyataan di masyarakat, banyak lembaga-lembaga pendidikan termasuk PKBM tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang efektif.

Pendidikan berbasis masyarakat sebagai satuan pendidikan dituntut untuk selalu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat

dengan dukungan pengelolaan yang profesional, bukan dilakukan secara rutinitas belaka, tidak dilakukan dengan cara-cara kajian ilmiah, dan kurang memperhatikan keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan upaya pengembangan berbagai kegiatan atau fungsi mutlak dilakukan. Selain itu, seiring dengan berjalannya perubahan lingkungan, pendidikan berbasis diharapkan mampu berkembang mencapai tataran ekspansi bukan sekedar dijalankan pada tataran rutinitas belaka, namun tumbuh, berkembang, dan akhirnya mampu melakukan perluasan, dan menghindari pelaksanaan kegiatan pendidikan yang hanya dilakukan secara asal jalan atau hanya bertahan hidup.

Terkait dengan hal di atas, keberhasilan fungsi pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat terletak pada kemampuan organisasi dan peronaliannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemampuan personalia dituntut mencapai tingkatan atau level kinerja yang paling tinggi yaitu mampu mencapai tahap pembaharuan (*innovating*). Pada level kinerja pembaharuan, personalia pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan berbagai ide/gagasan, praktek/kegiatan, dan karya-karya yang dipandang baru (Rogers,

1995:11) yang bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas personalia pendidikan berbasis masyarakat harus dapat diwujudkan secara tepat, terencana, dan menggunakan pendekatan cara-cara ilmiah dan profesional. Pendekatan pengembangan kapasitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang dilakukan yaitu: mendiagnosa kebutuhan, mendesain program pengembangan, melaksanakan aktivitas pengembangan kapasitas, dan mengukur atau menilai hasil pengembangan kapasitas ([www.unesdoc.unesco.org](http://www.unesdoc.unesco.org)).

Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat tidak lepas dari berbagai persoalan yang dihadapi, baik yang bersumber dari internal lembaga maupun dari lingkungan eksternal lembaga, dimana kedua sumber ini dapat secara simultan saling mempengaruhi. Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat adalah rendahnya kemampuan untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih efektif dan produktif dengan cara-cara yang lebih menantang, yang berorientasi pada pencapaian peluang ada ada dan berani menempuhnya. Sudah dapat dikatakan bahwa mayoritas lembaga pendidikan berbasis masyarakat khususnya

saat ini sangat kurang mengembangkan aktivitas-aktivitas berwirausahaan dalam mengembangkan programnya. Dengan kata lain, lembaga pendidikan berbasis masyarakat masih memiliki kapasitas kewirausahaannya (*entrepreneurship*) minim.

Zimmer memaknai kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha (Kasmir, 2007:17). Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya ([www.entrepreneur.gunadarma.ac.id/e-learning](http://www.entrepreneur.gunadarma.ac.id/e-learning)). Dengan kata lain kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan usaha memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang beda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada

akhirnya mampu memberikan kontribusi pada orang banyak.

Seorang yang memiliki kemampuan berwirausaha ditandai dengan sikap dan perilakunya yang dicirikan dengan karakteristik memiliki kepercayaan diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki keorisinilan dalam berfikir, dan memiliki perspektif ke masa depan, memiliki sikap kerja keras, bertanggungjawab atas semua aktivitas yang dilakukan, memiliki komitmen yang kuat dan teguh, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai pihak baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha maupun yang tidak (Kasmir, 2007:27-28). Pada tataran substansi berwirausaha, serorang yang memiliki kemampuan berwirausahaan adalah mereka yang (1) memiliki motivasi berprestasi tinggi, (2) memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam dunia usaha, dan (3) memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi peluang yang prospektif, menentukan peluang yang tepat dan layak untuk dicapai, merencanakan aktivitas berusaha, membangun jejaring social atau kemitraan baik secara institutional maupun personal, memulai kegiatan usaha dengan mencari sumberdaya (modal) yang diperlukan, memilih dan

mengembangkan personalia secara selektif, melakukan promosi dan penjualan yang tepat, dan memperkirakan keuntungan dan kerugian yang dicapai.

Sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan sumberdaya yang ada dari lingkungan, lembaga pendidikan berbasis masyarakat perlu mengkaji ketersediaan dan proporsi sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar tersebut dan seberapa besar peluang untuk mencapainya sebanding dengan kemampuan yang dimiliki. Sumberdaya khususnya masalah pendanaan dan fasilitas sangat terbatas ketersediaannya di masyarakat, dan mungkin sulit diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan-pemilihan sumberdaya yang mengandung peluang besar untuk dicapai harus dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan memahami peluang, potensi, dan cara serta resiko mencapainya.

Pentingnya kemampuan berwirausaha dimiliki oleh personalia pendidikan berbasis masyarakat didasarkan pada kenyataan yang terjadi saat ini dalam konteks pembangunan pendidikan baik menyangkut satuan pendidikan masyarakat sendiri maupun faktor lain. Pertama, rendahnya kemampuan berwirausaha disebabkan tradisi atau kebiasaan yang selama ini ada yaitu ketergantungan yang

tinggi pada pihak pemerintah sebagai penyedia sumberdaya (dana). Orientasi vertikal yang kuat ini berakibat pada ketidakdinamisan lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Aktivitas-aktivitas yang selama ini dilaksanakan sebagian besar terlaksana apabila sumberdaya yang disediakan pemerintah tersedia. Para personalia merasa bahwa kegiatan yang diselenggarakan hanya kegiatan yang didukung oleh pemerintah. Kedua, hal ini terkait dengan adanya perilaku-perilaku atau budaya menunggu. Ketidakaktifan personalia dalam mencari informasi dapat menghambat aktivitas pemberdayaan/pendidikan. Ketiga, terdapat ego sektoral ada masing-masing instansi atau lembaga pemberdayaan yang ada di masyarakat. Perspektif bahwa urusan masing-masing lembaga adalah terpisah nampaknya berkembang di masyarakat. Nuansa mengutamakan kepentingan lembaga sendiri menjadi masalah dalam upaya mengembangkan masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa tidak jarang kelompok sasaran lembaga-lembaga pemberdayaan adalah kelompok sasaran yang sama, namun masing-masing lembaga merasakan bahwa dirinya sendiri yang memiliki kepentingan pada kelompok sasaran sehingga sharing sumberdaya

kemungkinan tidak terjadi. Akhirnya, kelompok saran tidak dengan cepat dapat diberdayakan karena kurang sinergian dalam penanganan mereka.

Keempat, persaingan yang ketat antar lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan sumberdaya untuk memfasilitasinya, sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mencari potensi-potensi yang ada di masyarakat dengan beragam upaya. Dalam hal ini akan terjadi persaingan memperoleh sumberdaya sehingga untuk memenangkan persaingan tentunya kemampuan-kemampuan kreatif mutlak dibutuhkan oleh personalia lembaga pendidikan. Kelima, keberagaman kebutuhan masyarakat baik secara jenis maupun levelnya menjadi factor penting kemampuan berwirausaha. Lembaga pendidikan harus dapat mengenali, memahami, dan menentukan kebutuhan pendidikan masyarakat yang urgent, yang perlu segera disediakan layanan pendidikan. Peluang untuk menciptakan layanan pendidikan yang variatif dan dapat diterima kelompok sasaran menjadi suatu tantangan lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Terakhir, kerja sama antar lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam

pembedayaan masyarakat masih kurang terjalin misalnya kerja sama dengan dunia industri, lembaga keuangan dan lembaga donator. Lembaga-lembaga ini belum berkontribusi secara optimal dalam memberikan sumbangan baik material maupun nonmaterial guna kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berbasis masyarakat perlu melakukan suatu pendekatan kepada pihak dimaksud untuk tujuan memperoleh dukungan positifnya, dengan terlebih dahulu meningkatkan kemampuan menyampaikan pemikiran atau gagasan baik verbal maupun tulisan, bernegosiasi, dan memiliki komitmen yang tinggi.

### **Peningkatan kapasitas kewirausahaan**

Peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi personalia lembaga pendidikan berbasis masyarakat perlu dilakukan secara terencana, sistemik, dan terintegrasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan pada tataran lembaga pendidikan, lokal/regional, dan nasional.

### **Level satuan pendidikan**

Pengembangan kemampuan berwirausaha khususnya bagi pengelola atau tenaga kependidikan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat melalui kegiatan

pelatihan, dan pengembangan budaya learning organization. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan menekankan pada pengembangan sikap dan perilaku inovatif/kreatif, dan penguasaan kemampuan teknis berwirausaha atau mengembangkan suatu kegiatan. Pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan perilaku inovatif dimana keinginan untuk berprestasi atau maju, kemampuan berfikir kritis, kemampuan mengatasi masalah, dan mengambil keputusan dilakukan dengan proses pelatihan yang menantang dan dipandang menarik oleh peserta.

Proses pelatihan yang dapat dilakukan dengan maksud mencapai tujuan dimaksud mencakup kegiatan: penyadaran, pemberian pengalaman bermakna, dan merefleksikan hasil atau proses yang dilakukan. Penyadaran dapat dilakukan kepada para peserta pelatihan dengan melakukan pendekatan yang lebih humanis, memahami bahwa personalia lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah individu-individu yang memiliki kebutuhan, masalah dan potensi untuk berkembang. Salah satunya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*).

*Problem based learning* merupakan suatu upaya dalam membentuk kesadaran

kritis para personalia pendidikan berbasis masyarakat mengenai persoalan-persoalan apa yang sedang terjadi dan bagaimana akibatnya. Melalui *problem based learning*, seseorang atau personalia diharapkan membangun kesadaran akan masalah yang dihadapi, dan berkeinginan untuk mencari solusinya. Harapannya, personalia dapat menghasilkan ide-ide yang kreatif-produktif untuk mengembangkan lembaga pendidikannya. Permasalahan yang dapat dihadapkan kepada personalia dalam proses pelatihan kewirausahaan dapat terkait dengan kondisi kelompok sasaran program pendidikan berbasis masyarakat, keadaan lembaga pendidikan yang ada saat ini, saluran-saluran yang terbentuk dalam kehidupan, peraturan-peraturan pemerintah dan kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan yang dimiliki (Hisrisch, 2002:167).

Dalam upaya membentuk kesadaran kritis peserta pelatihan perlu dilakukan dengan pendekatan tepat. Seorang pendidik harus dapat diterima oleh peserta tanpa menimbulkan sikap apatis atau penolakan. Dalam hal ini seorang pendidik/pelatih perlu melakukan kegiatan-kegiatan persuasive terhadap kelompok sasaran. Komunikasi informal dan lisan, kunjungan langsung ke lembaga-lembaga pendidikan berbasis

masyarakat dapat dilakukan guna secara langsung berinteraksi dengan mereka. Tentunya, dirinya harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menghadapi warga masyarakat yang heterogen dan memiliki pemahaman-pemahaman yang mungkin non-rasional atau bahkan memiliki prasangka yang tinggi terhadap orang lain. Kemampuan komunikasi tentunya harus didukung oleh kebersediaan untuk melakukan dialog secara terbuka, dialog yang tidak semu, yang setiap orang memiliki hak yang setara dalam menyampaikan emikiran dan harapan-harapannya (Freire, 1972).

Apabila kesadaran untuk berwirausaha terbentuk, selanjutnya pemberian pengalaman perlu dilakukan. Dalam hal ini, pendekata-pendekatan pelatihan yang kontekstual, berbasis masalah serta bermakna dapat dilakukan. Berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan khususnya dalam pengembangan motivasi dan pengetahuan berwirausaha dapat dilakukan berikut: (a) Metode ceramah, digunakan untuk menyampaikan Informasi konseptual seperti teori, model, prinsip dan teknik; (b) Studi kasus, digunakan untuk mengembakan skill-skill yg kompleks seperti kemampuan

melihat alternatif solusi, mempertanyakan asumsi-asumsi. Berfikir secara analisis, aktif mendengar, berfikir analisis, dan mengenali dan mengatasi masalah; (c) Bermain peran digunakan untuk mengembangkan skill interpersonal yang mencakup manajemen konflik, negosiasi, mempengaruhi, membangun kerja sama tim, dll., (d) *Behavioral role modeling*, memiliki kesamaan dengan fungsi metode bermain peran, yaitu mengembangkan skill interpersonal yang mencakup manajemen konflik, negosiasi, mempengaruhi, membangun tim, dll, dan (e) Simulasi digunakan untuk mengembangkan kemampuan *problem solving*, interpersonal skill, dan berfikir analisis (Cinthya *et al*, 1998).

Pada prinsipnya metode-metode yang digunakan merupakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta. Melalui interaksi dengan pengalaman-pengalaman (*experiences*) baru, anak-anak diharapkan membentuk pemahaman dan nilai-nilai baru yang mengarah pada perbaikan diri (Illeris, 2004). Pengalaman ini akan menjadi instrumen yang penting di dalam menjalani proses belajar selanjutnya. Setiap menghadapi pengalaman baru, maka individu akan menggunakan pengalamannya

untuk menginterpretasikan dan bilamana perlu mengtransformasinya ke dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap baru (Jarvis,1992:14 ).

Dalam pelatihan kewirausahaan, pengalaman belajar yang diberikan bukan semata-mata teoritis, menghasilkan pengetahuan berwirausahaan semata namun perlu pula pengalaman belajar yang praktis, yang membekali peserta secara aplikatif melakukan kegiatan berwirausahaan. Oleh karena itu, desain pembelajaran berorientasi pada keterampilan berwirausaha perlu dikembangkan. Beberapa cara untuk memberikan pengalaman belajar ini adalah:

1. Praktek kunjungan lapangan. Peserta dapat secara individu maupun berkelompok mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan yang dipandang memiliki keunggulan dalam kegiatannya. Peserta dapat belajar mengenai berbagai aktivitas produksi, pemasaran, dan praktek-praktek lain yang memungkinkan dirinya belajar dari pengalaman keberhasilan pihak lain.
2. Penugasan dapat diberikan kepada peserta pelatihan dimana peserta baik individual maupun kelompok ditugaskan untuk merancang suatu rencana pengembangan usaha secara

sistematis dan berbasis kenyataan. Harapannya, terbangun kemampuan berfikir integrative dan kritis serta sistemik dalam melakukan kegiatan berwirausaha.

3. Magang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan kompetensi yang sudah dimiliki. Pemagangan peserta pelatihan akan membentuk kompetensi yang aplikatif dan sesuai kondisi bidang usaha dan pekerjaan.
4. Diskusi dalam forum kajian. Metode untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman kewirausahaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan kesempatan-kesempatan berharga seperti mendatangkan tokoh yang berhasil, kajian-kajian literature yang bernuansa kewirausahaan, dan para praktisi kewirausahaan yang ada di masyarakat.

Pengalaman belajar praktik langsung dalam berwirausaha perlu juga dilaksanakan. Secara kelompok, kalau memungkinkan individu, peserta diminta untuk mendirikan kegiatan usaha (inkubasi bisnis) dalam konteks pengembangan pendidikan sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing misalnya kegiatan

produksi alat permainan edukatif, konsultasi media pendidikan, penyediaan pelatihan *life skills*, atau lainnya. Peserta diminta untuk merancang dari awal desain kegiatan usahanya, mulai dari penentuan peluang, penentuan jenis kegiatan, strategi memasuki pasar, mencari dukungan pendanaan, membuat rencana pembiayaan, menentukan para pelaksananya, serta melaksananya. Rintisan usaha awal ini pastinya tidak akan berjalan baik apabila tidak disertai dengan pendampingan yang professional, bimbingan teknis, pemberian fasilitas dan penyediaan waktu yang cukup untuk berkarya. Melalui inkubasi bisnis ini, peserta akan lebih mudah menginternalisasikan nilai-nilai dan keterampilan dalam berwirausaha.

Tahapan selanjutnya adalah proses pererefleksian mengenai kegiatan pelatihan kewirausahaan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, proses pelatihan kewirausahaan yang sudah dilakukan perlu ditelaah keefektifannya: melihat terbentukannya kemampuan berwirausaha baik aspek pengetahuan, perubahan nilai, dan perubahan sikap berwirausaha yang dicapai oleh peserta pelatihan. Refleksi dilakukan dengan mengedepankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pelatihan melalui beragam

cara misalnya memberikan angket, wawancara, *brainstorming*, diskusi dan uji kompetensi, sehingga keutuhan dan keobyektivitasan informasi untuk penilaian dapat terbentuk. Diketuainya pencapaian tujuan pelatihan, menjadi feedback untuk perbaikan program pelatihan kewirausahaan, lembaga pendidikan berbasis masyarakat, dan/atau pihak lain. Akhirnya dapat terjadi proses penyebaran atau *sharing* pengetahuan dan pengalaman antar peserta, pendidik, dan pihak lain.

Untuk keberhasilan berwirausaha, lembaga pendidikan berbasis masyarakat tentunya harus mengubah fungsinya yang semula sebagai organisasi statis menjadi organisasi yang dinamis. Lembaga pendidikan perlu membangun iklim belajar yang mana setiap individu akan dengan mudah mencari informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang terbuka bagi ide-ide baru, khususnya ide berwirausaha, dan mendorong orang untuk menerapkannya. Selain itu, pengembangan pemahaman yang sama dan konsensus yang kuat sangat mutla dibutuhkan, karena keberhasilan lembaga pendidikan tidak akan dapat tercapai dengan tindakan-tindakan parsial-individul, namun dengan tindakan kolektif-integratif. Semua

pihak merasa keberhasilan lembaga pendidikan menjadi tujuan dan tugas bersama. Oleh karenanya, komunikasi dialogis antar personalia menjadi kunci untuk terbangunnya konsensus bersama.

### **Level Lokal**

Untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat di tingkat lokal dapat dilakukan tindakan-tindakan yang mencakup: (a) melakukan penguatan kelembagaan atau forum lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Berbagai kegiatan koordinasi dan pertemuan-pertemuan teknis dan ilmiah antar forum dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan sikap dan perilaku kewirausahaan, atau bahwa menjadi media untuk saling berbagi pengalaman dalam berwirausaha; (b) Peningkatan jejaring kemitraan (*networking*). Dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimiliki lembaga pendidikan, jaringan kemitraan perlu dibangun baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Kemitraan dibangun untuk memudahkan lembaga pendidikan mencari dukungan, sumberdaya ataupun bentuk fasilitasi lainnya dari lembaga mitra, sekaligus memberikan dukungan terhadap lembaga mitra. Pengembangan jaringan

kerja sama di level local, mensyaratkan kemampuan pemimpin lembaga pendidikan untuk mencapainya, pemimpin berfungsi sebagai mediator terhadap mitra; dan (c) Bersama-sama dengan mitra, kegiatan pengembangan usaha dalam bidang pendidikan perlu dilakukan oleh pengelola. Pengelola perlu mencari berbagai kesempatan yang positif untuk keberhasilan usahanya, misalnya berupaya melakukan koodinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka mempromosikan hasil-hasil karyanya, mendapatkan layanan bimbingan teknis dari lembaga lain, dukungan pendanaan, dan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan kemampuan lebih lanjut.

### **Level nasional**

Pada tingkat lebih makro, pengembangan kemampuan kewirausahaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat tidak lepas dari peranan pemerintah antara lain: (a) Pemerintah sebagai pengambil kebijakan public selalu menekankan pada pandangan bahwa masyarakat merupakan pelaku kegiatan pendidikan atau usahanya. Kebijakan-kebijakan yang diambil perlu mendasarkan pada pemikiran bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat merupakan lembaga yang kreatif dan mandiri sehingga terhindar dari

pengambilan keputusan yang dapat mematickan insiatif lembaga pendidikan; dan (b) Pemerintah dapat berfungsi sebagai media yang dapat menjembatani lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk mengembangkan keberadaannya dan fungsinya ke dalam lingkungan social yang lebih luas. Pemerintah bertindak sebagai pemotivasi pengelola pendidikan dengan memberikan stimulus-stimulus baik material maupun non material yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat; dan mendesain kerangka perizinan untuk berusaha yang lebih mudah dan dapat dilaksanakan.

## **PENUTUP**

Pengembangan kapasitas kewirausahaan bagi para pengelola lembaga pendidikan berbasis masyarakat oleh pihak terkait harus dilaksanakan atas dasar komitmen kuat untuk menentukan kegiatan yang sedang ditekuni dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Artinya, keberhasilan pengembangan kapasitas kewirausahaan bagi mereka sangat ditentukan oleh keinginan dan motivasi yang terbangun setiap stakeholder untuk mengimplementasikannya. Adanya komitmen menjadi suatu masukan atau landasan untuk menjalankan aktivitas

peningkatan kemampuan sehingga dimungkinkan dapat mencapai hasil yang bermakna. Oleh karenanya, para pihak yang terlibat terutama para pengelola lembaga pendidikan berbasis masyarakat harus memahami terlebih dahulu mengenai hakekat organisasi yang dikembangkannya dan sekaligus menetapkan nilai dan norma yang dapat mengarahkan peran dan fungsi sebagai pengembang masyarakat. Selain komitmen, kesadaran para individu dalam organisasi harus dibangun agar mereka memahami apa yang terjadi dalam lembaga mereka dan tantangan yang akan terjadi di masa depan sehingga memungkinkan lembaga dengan mudah melakukan pembaharuan dalam konteks mencapai tujuan lembaga.

## **Referensi**

- Cheng, Yin Cheong. (1996). *School effectiveness and school based management*. Hong Kong.
- Cinthy et al. (1998). *Center for creative leadership*. San Francisco; Jossey-bass.
- Fagerlind, Ingemar. & Saha, Lawerenc J. (1983). *Education and national development*. Oxpord: Pregamon Press.
- Fasli Jalal & Dedi S. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa

- Freire, Paulo. (1972). *Pedagogy of the oppressed*. Victoria: Penguin Books Ltd.
- Galbraith, Michael W. (1995). *Community-based organization and the delivery of lifelong learning opportunities*. Washington: U.S. department of Education.
- Hisrich, Robert D.(2002), *Entrepreneurship*. Boston; McGraw-Hill Irwin
- Illeris, Knud (2004). *Three dimensions of learning*. Florida: Krieger Publishing Company.
- Jarvis, P. ( 1992 ). *Paradoxes of Learning. On Becoming an Individual in*
- Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali press.
- Meriam, Sharan B. & Cunningham, Phyllis M. (1989). *Handbook of adult education and continuing education*. San Francisco: Jossey-bass publishers.
- Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan perubahan social*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Rogers, Everet M., (1995). *Diffusion of Inovations*. New York: The Free Press
- Taliziduhu Ndraha. (1990). *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2010), *Kewirausahaan*. diakses dari [www.entrepreneur.gunadarma.ac.id/e-learning](http://www.entrepreneur.gunadarma.ac.id/e-learning)).
- Problem based learning. Diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Problem-based\\_learning](http://en.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning).